

PERGESERAN KEKUATAN POLITIK DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH

Turtiantoro

Abstrac

The election 2009 is a quite phenomenal because the Democratic Party won the legislatif election the same President/Vice President election while the PDIP struggle for the second time failed, where as in Central Java positions untenable. The election 2004 PDIP won 24 seats, 2009 23 seats and 2014 27 seats.

The research is are qualitative case study approach. The main characteristic of are good case study is to demonstrate are deep understanding of the case.

The results that the number of seats and party that is able to put cedres in DPRD Central Java Province in 2004 was 7 party in 2009 11 political party and 2014 there were 8 political parties all of wich affect the opportunity to occupy positions in the Provincial Parliament Central Java. Keyword: Legislative, Electoral, Central Java.

1. Pendahuluan

Menurut Richard S. Katz, tidak ada diskusi tentang demokrasi kontemporer yang dapat mengabaikan fakta bahwa demokrasi modern niscaya adalah demokrasi perwakilan (Crotty William, Katz S. Richard, 2014, hlm.65). Demikian pula Indonesia sebagai negara demokrasi, secara periodik telah menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih wakil-wakil rakyat diikuti partai-partai politik yang memenuhi syarat administrasi sebagai organisasi berbadan hukum dan diverifikasi sebagai peserta untuk meraih sejumlah kursi di DPR, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Selain itu yang bersifat perorangan disediakan sebanyak empat kursi untuk tiap-tiap Provinsi yang secara nasional direpresentasikan melalui Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Dalam perwakilan rakyat, yang diwakili adalah sejumlah warga negara yang bertempat tinggal di suatu daerah atau distrik tertentu (Surbakti Ramlan, 1992, hlm 174).

Tuntutan Demokratisasi yang menggebu diawal era reformasi telah dibuktikan melalui pemilu 1999 yang mampu merubah peta kekuatan politik dan itu terus bergerak dinamis di tahun 2004, tahun 2009 dan pemilu 2014 termasuk di Jawa Tengah. Kondisi empat periode itu menarik untuk diamati.

Pertama, bahwa pemilu yang demokratis tidak selalu diikuti dengan pelembagaan nilai-nilai politik. Kasus korupsi yang sampai kini muncul silih berganti dengan aktor utama anggota DPR/DPRD menjadi bukti nyata betapa kepemimpinan, keteladanan, dan integritas moral belum sepenuhnya memandu perilaku politisi.

Kedua, Kebijakan desentralisasi politik termasuk dalam Pemilihan Kepala Daerah yang di awal reformasi hasilnya bersifat final menempatkan DPRD sebagai pemeran dominan dalam menentukan eksistensi dan kelangsungan jabatan Kepala Daerah menimbulkan stigma “aji mumpung” karena menang atau kalah sepenuhnya ditentukan perolehan suara di DPRD babak selanjutnya memanfaatkan pertanggungjawaban akhir tahun Kepala Daerah sebagai ajang transaksi politik dengan kompensasi uang. Peristiwa ini marak ketika berlaku Undang-Undang No

22 Tahun 1999 dan fenomena tersebutlah yang antara lain mendorong perubahan dari pilkada berbasis wakil rakyat menjadi pilkada langsung/berbasis rakyat.

Ketiga, tersedianya koran halaman lokal yang marak sejak era reformasi menjadi ajang pencerahan politik karena berfungsi sebagai penyampai berita, sumber informasi dan kontrol terhadap jalannya pemerintah daerah namun suhu politik lokal juga mudah menghangat bahkan memanas karena ketika ada kasus hukum yang membelit politisi lokal cepat menyebar dan mudah diakses publik. Kala itu, PDI Perjuangan di Jawa Tengah sering direpotkan dengan kondisi tersebut karena sebagai pemenang pemilu paling mudah dijadikan sasaran tembak apalagi dengan mengingat jejak rekam sebagian kader yang duduk di lembaga perwakilan di daerah merupakan titik lemah. Awal mula mereka terjun ke politik untuk sebagian bermodal keberanian di tengah situasi politik yang diliputi ketakutan, dominasi, dan represi Orde Baru. Diantara mereka ada yang tidak punya pekerjaan tetap, pendidikan minim atau tidak melalui proses kaderisasi berjenjang yang berakibat kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi di DPRD kadang memprihatinkan. Akibatnya partai kadang lebih nampak sebagai kekuatan politik nominal dibanding sebagai kekuatan riil. Di tahun 2000 kami pernah ikut membahas Raperd di Kota Semarang, seharian duduk bersebelahan dengan anggota DPRD, ia tidak bicara apapun, tidak mengkritisi, menanggapi atau mengomentari naskah yang dipegangnya.

Keempat, di tingkat nasional dalam empat kali pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014 terjadi perubahan peta kekuatan politik yang menggambarkan fragmentasi tajam yang tidak mengarah pada pengurangan jumlah partai politik kecuali pemilu 2014. Pemilu tahun 1999 diikuti 48 partai politik, pemilu 2004 diikuti 24 partai politik, pemilu 2009 diikuti 46 partai politik, dan tahun 2014 diikuti 10 partai politik. Tahun 1999 PDI-P menang dalam pemilu Legislatif dengan perolehan 35.689.073 suara atau 33,74% (153 kursi DPR) namun tidak mampu mengantarkan Megawati sebagai Ketua Umum partai untuk menduduki jabatan sebagai Presiden karena dikalahkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai ketua Umum PKB dengan modal politik 13.336.982 suara atau 12,61% karena didukung koalisi Poros Tengah. Gerakan yang dipelopori Amin Rais dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mampu menjungkirbalikkan logika politik karena di dalam sidang MPR berhasil memenangkan pertarungan pemilihan Presiden. Pemilu tahun 1999 sebagai indikator atau cara yang sah dan bisa diterima untuk mendistribusikan kekuatan politik secara formal ternyata melahirkan gejolak. Konflik politik semakin meruncing ketika Gus Dur mengatakan bahwa DPR seperti Taman Kanak-Kanak berujung pada pelengseran sebagai Presiden, Megawati naik sebagai Presiden dan Wakil Presiden diisi Hamzah Has dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk masa jabatan sampai dengan tahun 2004. Tahun 2004 Golkar menang namun dalam Pilpres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampil sebagai pemenang. Tahun 2009 partainya SBY yaitu Partai Demokrat menang dalam Pemilu Legislatif dan Pilpres sehingga untuk kedua kalinya SBY menduduki jabatan Presiden.

Kelima, Pemilu 2009 merupakan babak baru dalam meningkatkan kualitas pemilu ditandai dengan kebijakan strategis merubah sistem daftar partai sebagian terbuka ke sistem daftar partai terbuka penuh. Kebijakan yang digulirkan akhir tahun 2008 dan berlaku pada pemilu 2009 sempat menimbulkan keresahan calon legislatif di pusat dan daerah karena nomor urut tinggi menjadi tidak bermakna

bila tidak mampu memperoleh suara yang cukup untuk mendapatkan kursi. Bagi sebagian lainnya merupakan berkah karena untuk mendapatkan kursi seorang calon tidak lagi terpancang pada nomor urut daftar calon namun pada perolehan jumlah suara. Selain itu ada keputusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas parlemen 2,5% suara untuk memenangkan kursi di parlemen. Kebijakan ini diarahkan untuk menekan pertumbuhan yang subur dari jumlah partai politik.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Ciri utama studi kasus yang baik adalah memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut. Studi ini adalah kasus tunggal karena yang dianalisis adalah pergeseran kekuatan politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan mendeskripsi atau menyajikan gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dan berkembang di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk mempertajam data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan wawancara yang dipandu interview guide pada kalangan politisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah dan penelusuran data sekunder berupa arsip dan dokumen yang ada perpustakaan dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

3. Pembahasan

3.1. Dinamika Kekuatan Politik

Setiap partai politik mempunyai struktur organisasi dari pusat sampai ke daerah, bahkan di Kabupaten/Kota masih ada struktur di bawahnya yaitu di kecamatan, desa/kelurahan. Politik sebagai konsep, dapat ditelusuri dari lima pandangan. *Pertama*, politik ialah usaha-usaha yang ditempuh warganegara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama. *Kedua*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Ketiga*, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Keempat*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum. *Kelima*, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting (Ramlan Surbakti, 1992, hal. 1-2). Mengapa orang ingin menjadi anggota partai?. Menurut Knut Heidar, orang-orang bergabung untuk mendapatkan pengaruh, keuntungan material, informasi, manfaat sosial atau kepuasan mental (Crotty William, Katz S. Richard, 2014, hlm 499).

Dari lima pandangan tersebut di atas maka pemilu legislatif memenuhi rumusan dari pandangan ketiga yaitu kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Lebih tajam lagi bila mengikuti pengertian dari Robson. Menurut Robson sebagaimana disampaikan Ramlan Surbakti, ilmu politik sebagai ilmu yang memusatkan perhatian pada perjuangan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, memengaruhi pihak lain, ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan. Ilmu politik mempelajari hal ikhwal yang berkaitan dengan kekuasaan dalam masyarakat, yakni sifat, hakikat, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil kekuasaan (Surbakti Ramlan, 1992, hlm 5-6).

Dalam khasanah ilmu politik dikenal sejumlah konsep berkenaan dengan kekuasaan (power), seperti misalnya pengaruh (influence), persuasi (persuasion), manipulasi (manipulation), paksaan (coertion), kekuatan (force), dan kewenangan (authority). Dalam pelaksanaan pemilu, kemampuan untuk memengaruhi orang lain sangatlah penting karena melalui kemampuan tersebut, orang lain terutama yang mempunyai hak pilih diharapkan akan mengikuti gagasan dan kehendak dari para calon yang bersaing dalam meraih kekuasaan. Penggunaan pengaruh tersebut adalah tindakan yang sifatnya manipulatif karena pemilih tidak sepenuhnya menyadari bahwa tingkahlakunya adalah dalam rangka mematuhi kehendak calon. Untuk itu dibutuhkan strategi agar orang lain mengikuti kehendaknya dan strategi yang tepat haruslah merupakan pilihan yang cocok. Sedangkan partai politik ialah organisasi yang mempunyai kegiatan yang berkesinambungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup pemimpinnya. Partai politik merupakan organisasi yang terbuka dan permanen tidak haya di tingkat pusat, tapi juga di tingkat lokal (Ramlan Surbakti, 1992, hal.114).

Sebagaimana diketahui bahwa pemilu di Indonesia untuk pertamakalinya dilaksanakan di tahun 1955. Pemilu tersebut secara luas dinilai sebagai pemilu yang demokratis dan berjalan dengan lancar walaupun berlangsung di tengah situasi politik dan keamanan yang terganggu disebabkan pergolakan bersenjata yang menyatakan dirinya sebagai Darul Islam (DI) di sebagian Provinsi Jawa Barat dan yang berbatasan dengan Jawa Tengah dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Keberhasilan pemilu tersebut tidak diikuti dengan kinerja Konstituante yang berfungsi mengambil keputusan politik strategis termasuk menentukan dasar negara. Konflik tanpa konsensus terus berlarut bahkan sebagian anggota Konstituante tidak lagi berminat untuk menghadiri persidangan. Keretakan politik semakin meluas antara lain ditandai ketika sebagian kalangan militer berembung bersama-sama dengan tokoh pimpinan politik Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) untuk mendirikan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) berbasis di Sumatera Barat. Selain itu pemerintah juga masih menghadapi pergolakan bersenjata di Sulawesi Selatan dipimpin Abdul Qahhar Muzakkar. Kondisi tersebut ikut mewarnai keputusan politik yang kemudian dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Pasca penetapan dekrit yang dikenal sebagai era demokrasi terpimpin adalah alat untuk mengatasi perpecahan yang muncul di dataran politik Indonesia dalam paruh kedua tahun 1950-an, suatu sistem yang otoriter diciptakan dimana peran utama dimainkan oleh Presiden Soekarno (Chrouch Harold, 1986, hlm. 44). Soekarno menyadari bahwa dengan dekrit yang didukung TNI telah memberikan kekuasaan lebih besar sebagai presiden sekaligus menempatkan dirinya dalam keterikatan dengan tentara sehingga perlu dibangun hubungan yang saling menghargai atau tidak meremehkan, menciptakan kesibukan bersama dalam rangka pembebasan Irian Barat karena pendudukan berlanjut oleh Belanda dianggap sebagai penghinaan nasional hampir seluruh kelompok politik (Chrouch Harold, 1986, hlm 47), setelah sebelumnya Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) karena sebagian tokohnya terlibat pemberontakan PRRI. Untuk memperkuat keseimbangan antar kutub kekuatan politik, Presiden menjaga hubungan dekat dengan militer sembari mendorong kegiatan kelompok-kelompok sipil termasuk PKI yang kemudian keduanya berada

dalam persaingan tidak terdamaikan berpuncak pada peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Puncak konflik tersebut menempatkan Sukarno pada kenyataan harus turun dari kekuasaan dan Angkatan Darat yang dipimpin Suharto tampil sebagai pemenang. Sembari terus menghancurkan PKI sampai ke akar-akarnya dengan dalih melakukan pemberontakan, maka untuk memperkuat posisi politiknya Suharto melakukan konsolidasi dengan menciptakan jargon "Orde Baru" yang dirancang sebagai faktor pembeda dengan rezim sebelumnya, melemahkan PNI sebagai potensi ancaman dengan membelah menjadi PNI-ASU (Ali Sastroamidjojo-Surahman) sebagai PNI kekiri-kirian, dan PNI- Osa-Usep (Osa Maliki-Usep Ranuwihardjo) sebagai PNI kanan yang seiring dengan Orde Baru, melakukan pembersihan terhadap elit politik lainnya yang tidak sejalan atau potensial menjadi musuh, mempersiapkan Golkar sebagai pijakan kekuasaan. Pemilu tahun 1971 yang dimenangkan Golkar diikuti fusi di tahun 1973 yang menggabungkan PNI, Murba, Parkindo Partai Katolik, dan IPKI menjadi PDI, sedangkan Parmusi, NU, Perti, dan PSII menjadi PPP, makin memuluskan kekuasaan Suharto untuk lima kali sesudahnya di tahun 1977, 1982, 1987, 1992 berpuncak pada kemenangan pemilu tahun 1997 dan 10 Maret 1998 melalui Sidang MPR kembali menggenggam kekuasaan sebagai Presiden untuk lima tahun lagi sampai tahun 2003. Jabatan yang baru diraih kembali itu menjadi titik balik karena tidak sampai tiga bulan kemudian, 21 Mei 1998 Soeharto jatuh dari singgasana kekuasaan karena tekanan massa, krisis kepercayaan dan krisis kekuasaan yang tidak mampu dibendung.

Ketika Indonesia mengakhiri abad XX dan memasuki abad XXI antara lain ditandai konflik komunal dan sparatisme yang makin menggejala. Di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Provinsi Kalimantan Tengah konflik komunal menimbulkan korban cukup banyak. Demikian pula di Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah, Ambon di Provinsi Maluku juga dilanda konflik komunal. Di Aceh waktu itu, konflik sparatisme terus menimbulkan korban, adu kekuatan bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat keamanan sulit diprediksi kapan berakhir. Di Papua juga dihadapkan pada permasalahan yang sama, kelompok bersenjata terus menunjukkan eksistensinya, secara sporadis melakukan penyergapan dan penyerangan terhadap patroli aparat keamanan (TNI) yang menimbulkan korban ke dua pihak. Oleh sebab itu ketika Indonesia di bawah pemerintahan Soeharto yang lama berkuasa jatuh di tahun 1998, menurut Dirk Tomsa, hanya sedikit pengamat yang yakin bahwa Indonesia mampu membangun demokrasi yang stabil (Aspinal Edward&Mietzner Marcus (ed), 2010, hlm.141). Pendapat tersebut masuk akal karena tidak lama setelah BJ. Habibie menggantikan posisinya, situasi pelbagai sektor kehidupan makin pelik termasuk Provinsi Timor Timur.

Bergulirnya reformasi, para pejuang pro kemerdekaan menemukan momentum terbaik untuk merealisasi cita-citanya (Hadi Syamsul&Widjajanto Andi, 2007 hlm.184). Di dalam negeri mereka semakin bersemangat melakukan tekanan politik, dan di dunia internasional dukungan terhadap kemerdekaan Timor Timur makin besar. Perubahan politik drastis di Indonesia dan desakan dunia internasional yang menguat tersebut menjadikan pemerintahan BJ.Habibie mengambil terobosan kebijakan yang mengabaikan Ketetapan No.IV/MPR/1978 tentang Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyelenggarakan jajak pendapat. Ada dua opsi yang diajukan

yaitu *pertama*, otonomi khusus, *kedua*, merdeka. Jajak pendapat 30 Agustus 1999 dan tanggal 4 September menghasilkan 94.338 suara (21,5%) memilih opsi otonomi khusus, 344.508 suara (78,5%) memilih opsi merdeka. (Hadi Syamsul&Andi Widjajanto, 2007, hlm 191). Hasil tersebut akhirnya dikukuhkan dengan Ketetapan MPR No.V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur.

Lepasnya Timor Timur menempatkan BJ.Habibie dalam posisi politik sulit dan dilematis karena dunia internasional menganggap sebagai pemimpin yang demokratis, namun di dalam negeri tidaklah demikian. Produk keputusan politiknya telah melukai dan mengecewakan pendukung integrasi dan sebagian kalangan militer. Sejak penyerangan pertama oleh *The Blue Jeans Soldiers* September 1975 sampai dengan digelarnya operasi seroja untuk memperkuat integrasi (Sutiyoso, 2013, hlm. 120), banyak prajurit yang mengalami cacat fisik atau meninggal dalam tugas bahkan untuk sebagian jasadnya tidak ditemukan.

Semangat reformasi yang menggebu menjadikan pertanggungjawabannya di depan MPR ditolak karena dianggap sebagai kalanjutan rejim Soeharto. Keputusan tersebut telah memotong rantai hegemoni Orde Baru dan menutup kemungkinan dirinya maju sebagai calon presiden yang berarti membuka peluang munculnya calon-calon baru. Dibalik itu kelumpuhan ekonomi dan krisis multidimensi terus bergulir dan beresonansi pada krisis kepercayaan pada pemerintahan di pusat dan di daerah. Pemilu 1999 yang dilaksanakan di era BJ.Habibie guna memperoleh legitimasi politik baru, berhasil merubah peta politik yang enam kali sebelumnya termasuk pemilu 1997 Golkar tidak tergoyahkan, kali ini PDI-Perjuangan tampil sebagai pemenang, namun tidak menjadikan suhu politik menurun.

Praktek politik Indonesia setelah Habibie digantikan Gus Dur juga tidak mulus. Perang opini, adu argumen, bahkan fatwa sebagian pemuka agama berseliweran di media yang menyatakan bahwa negara dipimpin wanita hukumnya haram karena pemimpin (Imam) adalah laki-laki. Aspirasi seperti ini yang merefleksikan kehendak untuk berpaling dari Pancasila sebagai dasar negara memberi gambaran bahwa rivalitas dan kompesisi dengan mencampuradukkan antara agama dan politik atau politisasi agama yang pernah begitu tajam di era demokrasi parlementer ternyata tidak sirna dari kancah perpolitikan Indonesia era reformasi.

Keberhasilan dalam melewati masa transisi yang dipenuhi dinamika politik sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014 menjadi terganggu ketika sebagian tokoh dari partai poliitik, birokrasi, dan lembaga pemerintahan yang lain, termasuk di daerah terjerat kasus korupsi. Data akhir tahun 2014 mengungkap bahwa ada 325 kepala dan wakil kepala daerah, 76 anggota DPR dan DPRD, serta 19 menteri dan pejabat lembaga negara yang terjerat kasus korupsi (Kompas,24-12-2014). Kendati konflik antar elit politik cukup tajam namun tetap berada koridor normatif, partisipasi politik makin berkembang, relatif tertib dan mampu menjaga etika serta mulai terbiasa dengan dialog untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terhadap kebijakan atau dalam bentuk tuntutan.

Di Jawa Tengah selama diadakan pemilu di era reformasi berjalan relaatif lancar dan sejak pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009 PDI Perjuangan selalu memperoleh kemenangan, namun fenomena umum yang terjadi adalah adanya pergeseran jumlah perolehan suara yang berujung pada perubahan perolehan kursi

di DPRD termasuk kemenangan PDI Perjuangan dalam pemilu 2014 yang mengalami kenaikan dibanding pemilu sebelumnya.

3.2. Demografi Pemilih di Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Dari Tabel II.2 diketahui bahwa penduduk terbanyak tahun 2004 ada di Kabupaten Brebes, kedua Kabupaten Cilacap, dan ketiga Kabupaten Banyumas. Peringkat tersebut sama dengan pemilih tiga terbanyak yaitu Kabupaten Brebes 1.174.077 orang, Cilacap 1.137.553 orang, Banyumas 1.069.993 orang. Urutan tiga terbawah adalah Kota Magelang 86.943 pemilih, Salatiga 118.692 pemilih dan Tegal 173.468 orang. Jumlah pemilih tahun 2004 22.791.184 orang atau 69,98% dari jumlah penduduk.

Tabel 1.

Jumlah Penduduk, Pemilih dan TPS di Jawa Tengah Dalam Pemilu 2009

No	Kabupaten/Kota	Σ Penduduk	Σ Pemilih	Σ TPS
1	Cilacap	1.651.940	1.373.704	6.087
2	Banyumas	1.570.598	1.271.777	4.188
3	Purbalingga	858.798	680.641	2.214
4	Banjarnegara	875.214	721.927	2.400
5	Kebumen	1.162.294	962.567	2.451
6	Purworejo	696.141	620.652	2.129
7	Wonosobo	758.993	603.549	2.397
8	Magelang	1.194.353	912.400	3.310
9	Boyolali	936.822	772.508	2.867
10	Klaten	1.135.201	1.013.986	3.029
11	Sukoharjo	832.094	651.182	1.948
12	Wonogiri	929.870	901.215	3.075
13	Karanganyar	821.964	666.337	2.415
14	Sragen	861.939	731.008	2.441
15	Grobogan	1.316.693	1.039.071	3.376
16	Blora	833.786	697.350	2.472
17	Rembang	5.96.801	462.753	1.474
18	Pati	1.198.935	1.003.299	4.153
19	Kudus	788.264	580.925	1.792
20	Jepara	1.115.688	808.800	2.503
21	Demak	1.067.993	787.246	2.595
22	Semarang	944.877	720.542	2.528
23	Temanggung	715.907	561.392	1.953
24	Kendal	905.533	727.107	2.556
25	Batang	713.942	558.991	2.349
26	Pekalongan	845.471	659.972	2.053
27	Pemalang	1.264.535	1.052.230	3.468
28	Tegal	1.399.789	1.142.163	2.678
29	Brebes	1.742.528	1.403.827	4.616
30	Kota Magelang	118.606	93.640	372

31	Kota Surakarta	501.650	392.494	1.252
32	Kota Salatiga	173.056	122.779	517
33	Kota Semarang	1.585.417	1.087.463	4.072
34	Kota Pekalongan	284.413	206.318	525
35	Kota Tegal	240.777	198.812	621
	Jumlah	32.643.612	26.190.629	88.876

Sumber : KPU Jawa Tengah 2015

Dari Tabel 1. diketahui bahwa jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2009 sebanyak 32.643.612 orang dengan jumlah pemilih 26.190.629 orang atau dibandingkan dengan tahun 2004 mengalami kenaikan 3.399.445 orang atau 12,98%. Kenaikan cukup besar tersebut cukup mengherankan karena bila ketika data tahun 2009 dihadapkan pemilih tahun 2014 yang jumlahnya 27.114.590 orang hanya naik 3,41% dan yang ini lebih masuk akal karena tiap tahun hanya mengalami kenaikan sekitar 0,66% sedangkan antara tahun 2004 – 2009 rata-rata tiap tahun jumlah penduduk mengalami kenaikan 2,59%. Kondisi ini secara hipotesis memperlihatkan data jumlah pemilih tahun 2004 lemah belum baik dan belakangan mengalami perbaikan sehingga jumlah pemilih tahun 2014 lebih masuk akal. Terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2009 maka diketahui bahwa Kabupaten Cilacap merupakan daerah yang paling banyak menyediakan TPS yaitu 6.087 buah, berikutnya Brebes 4.616 buah, dan ketiga Banyumas 4.188 buah. jumlah TPS tiga peringkat terbawah adalah Kota Tegal 621 buah, Salatiga 517 buah, dan Magelang 372 buah. Peringkat tersebut sama dengan jumlah pemilih tiga terbawah yaitu Kota Tegal, Salatiga, dan Magelang.

Tabel 2.

Daftar Pemilih dan TPS Jawa Tengah Dalam Pemilu 2014

No	Kabupaten/Kota	Jumlah TPS	Rekapitulasi DPT		
			Daftar Pemilih Tetap		
			L	P	Jumlah
1	Banjarnegara	2.199	381.000	374.203	755.203
2	Banyumas	3.238	654.677	658.095	1.312.772
3	Batang	1.693	288.844	291.344	580.188
4	Blora	2.023	342.686	353.888	696.574
5	Boyolali	2.413	392.383	399.769	792.152
6	Brebes	3.694	743.929	729.075	1.473.004
7	Cilacap	4.404	731.986	734.673	1.499.650
8	Demak	2.191	412.923	416.445	829.368
9	Grobogan	2.978	539.537	552.437	1.091.974
10	Jejara	2.222	412.485	416.018	828.503
11	Karanganyar	2.006	336.026	344.059	680.085
12	Kebumen	3.014	520.302	514.415	1.034.717
13	Kendal	2.183	373.389	382.704	756.093
14	Klaten	3.033	488.553	510.143	998.696
15	Kota Magelang	264	44.318	48.071	92.389
16	Kota Pekalongan	564	107.365.	107.841	215.205
17	Kota Salatiga	386	61.812	66.078	127.890

18	Kota Semarang	3.258	534.405	566.885	1.101.290
19	Kota Surakarta	1.371	198.178	210.362	408.951
20	Kota Tegal	483	98.178	98.169	159.347
21	Kudus	1.591	292.138	304.001	596.139
22	Magelang	3.345	471.159	477.076	948.235
23	Pati	2.759	501.962	520.383	1.022.345
24	Pekalongan	1.726	354.744	349.970	704.714
25	Pemalang	2.714	547.558	542.402	1.089.960
26	Purbalingga	1.926	361.186	357.082	718.268
28	Rembang	1.777	237.564	237.887	475.381
29	Semarang	2.103	365.954	397.004	744.958
30	Sragen	2.594	397.529	388.087	767.616
31	Sukoharjo	2.067	330.801	338.677	669.478
32	Tegal	2.894	596.277	581.837	1.178.114
33	Temanggung	1.881	289.328	289.604	578.932
34	Wonogiri	2.784	449.268	454.865	904.133
35	Wonosobo	2.024	329.754	322.355	652.109
	Jumlah	77.687	13.479.477	13.635.113	27.114.590

Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah 2015

Dari Tabel I.3. diketahui bahwa pada pemilu 2014 jumlah pemilih tetap di Jawa Tengah sebanyak 27.114.590 orang yang terdiri dari pemilih laki-laki 13.479.477 orang dan pemilih perempuan sebanyak 13.635.113 orang atau lebih banyak pemilih perempuan 555.635 orang. Jumlah pemilih terbanyak ada di Kabupaten Cilacap yaitu 1.499.650 orang pemilih dengan TPS 4.404 buah, kedua Kabupaten Brebes 1.473.004 orang dengan jumlah TPS 3.694 buah, dan ketiga Kabupaten Banyumas 1.312.772 orang pemilih dengan jumlah TPS 3.238 buah sehingga diketahui bahwa dilihat dari peringkat jumlah pemilih Kabupaten Banyumas menduduki peringkat tiga namun dari jumlah TPS lebih banyak Kota Semarang yaitu 3.258 buah sedangkan TPS di Kabupaten Banyumas 3.238 buah atau TPS di Kota Semarang lebih banyak 20 buah. Perbedaan tersebut sulit ditemukan latar belakang dan alasannya, namun secara hipotesis disebabkan penduduk Kota Semarang lebih banyak dengan kepadatan yang cukup tinggi, wilayah tidak terlalu luas, heterogenitasnya juga lebih nyata sehingga rasio jumlah pemilih dengan jumlah TPS diperkecil sedangkan domisili penduduk di Daerah Kabupaten cenderung lebih tersebar sehingga yang menjadi prioritas adalah keterjangkauan terutama di wilayah perdesaan. Sedangkan jumlah pemilih peringkat bawah dalam pemilu tahun 2014 adalah Kota Tegal 159.347 orang, Kota Kota Salatiga 129.189 orang dan Kota Magelang 92.389 orang sedangkan peringkat bawah jumlah TPS yaitu Kota Pekalongan 525 buah, Kota Salatiga 517 buah, Kota Magelang 372 buah TPS.

3.3. Pembagian Wilayah Administrasi dan Daerah Pemilihan

Sejak Orde Baru jatuh di tahun 1998 sampai kini telah banyak usaha untuk memperbaiki penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil

Kepala Daerah. Untuk desa telah diterbitkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini disusun tersendiri dan itu berbeda dengan sebelumnya yang menempatkan pengaturan desa hanya sebagai bagian dari Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan hal sama pada undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu Undang-Undang No 22 tahun 1999.

Tabel 3.
Pembagian Wilayah Administrasi di Jawa Tengah tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Desa&Kelurahan
1	Cilacap	24	269	15	284
2	Banyumas	27	301	30	331
3	Purbalingga	18	224	15	239
4	Banjarnegara	20	266	12	278
5	Kebumen	26	449	11	460
6	Purworejo	16	469	25	494
7	Wonosobo	15	236	29	265
8	Magelang	21	367	5	372
9	Boyolali	19	261	6	267
10	Klaten	26	391	10	401
11	Sukoharjo	12	150	17	167
12	Wonogiri	25	251	43	294
13	Karanganyar	17	162	15	177
14	Sragen	20	196	12	208
15	Grobogan	19	273	7	280
16	Blora	16	271	24	295
17	Rembang	14	287	7	294
18	Pati	21	401	5	406
19	Kudus	9	123	9	132
20	Jejara	16	184	11	195
21	Demak	14	243	6	249
22	Semarang	19	208	27	235
23	Temanggung	20	266	23	289
24	Kendal	20	266	20	286
25	Batang	15	239	9	248
26	Pekalongan	19	272	13	285
27	Pemalang	14	211	11	222
28	Tegal	18	281	6	287
29	Brebes	17	292	5	297
30	Kota Magelang	3	-	17	17
31	Kota Surakarta	5	-	51	51
32	Kota Salatiga	4	-	22	22
33	Kota Semarang	16	-	177	177
34	Kota Pekalongan	4	-	47	47
35	Kota Tegal	4	-	27	27
	Jumlah	537	7809	769	8.578.

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2014.

Dari jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di tiap Kabupaten/Kota maka tidak paralel dengan jumlah TPS. Dalam Pemilu 2014 jumlah TPS terbanyak ada di Kabupaten Cilacap, kabupaten Brebes, dan Kota Semarang. Hal itu memberi gambaran bahwa faktor luas wilayah mempengaruhi jumlah TPS seperti di Kabupaten Cilacap dan Brebes sedangkan Kota Semarang lebih nampak sebagai gambaran tentang luas wilayah dan jumlah penduduk. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.653 Tahun 2003 tentang penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) maka untuk Provinsi Jawa Tengah meliputi 10 Dapil yang masing-masing Dapil mendapat kuota kursi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan jumlah Kabupaten/Kota di wilayah Dapil dengan total 100 kursi.

Tabel 4.

**Daerah Pemilihan dan Kuota Kursi DPRD Provinsi Jawa Tengah
Dalam Pemilu Tahun 2014**

No	Daerah Pemilihan	Kuota Kursi
1	Daerah Pemilihan I <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Semarang • Kabupaten Kendal • Kota Salatiga • Kota Semarang 	10
2	Daerah Pemilihan II <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Demak • Kabupaten Jepara • Kabupaten Kudus 	9
3	Daerah Pemilihan III <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Grobogan • Kabupaten Pati • Kabupaten Rembang 	12
4	Daerah Pemilihan IV <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Karanganyar • Kabupaten Sragen • Kabupaten Wonogiri 	8
5	Daerah Pemilihan V <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Boyolali • Kabupaten Klaten • Kota Surakarta • Kabupaten Sukoharjo 	10
6	Daerah Pemilihan VI <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Magelang • Kota Magelang 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Purworejo • Kabupaten Temanggung • Kabupaten Wonosobo 	11
7	Daerah Pemilihan VII <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Purbalingga • Kabupaten banjarnegara • Kabupaten Kebumen 	8
8	Daerah Pemilihan VIII <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Cilacap • Kabupaten Banyumas 	10
9	Daerah Pemilihan IX <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Tegal • Kota Tegal • Kabupaten Brebes 	11
10	Daerah Pemilihan X <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Batang • Kabupaten Pekalongan • Kota Pekalongan • Kabupaten Pemasang 	10
	Jumlah	100

Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah 2015

3.4. Pergeseran Kekuatan Politik

Walaupun sejak pemilu tahun 1999 sampai dengan pemilu tahun 2014 PDI Perjuangan mengalami dinamika, namun Jawa Tengah mampu dipertahankan sebagai lumbung perolehan suara dan menjadi andalan kontribusi suara pada tingkat nasional, sebagai provinsi dengan perolehan suara terbanyak, dan menang di sebagian besar kabupaten/kota yang ada. Kondisi ini menjadikan PDI-Perjuangan Jawa Tengah Jawa Tengah dari perpektif nasional mendapatkan tempat istimewa karena dibalik dinamika dan pasang surut perolehan suara sejak pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009 dan pemilu legislatif tahun 2014, PDI Perjuangan tetap mampu mempertahankan posisi sebagai pemegang suara dan kursi terbanyak. Walaupun tidak bisa mengembalikan pada posisi pemilu tahun 2004 yang meraih 31 kursi, perolehan 27 kursi pada pemilu 2014 sudah merupakan prestasi sendiri karena data tahun 2009 ditandai dengan fenomena melejitnya Partai Demokrat dan setelah pemilu 2009 PDI-Perjuangan Jawa Tengah menghadapi masalah pelik karena Murdoko, SH sebagai Ketua DPD PDI-Perjuangan Jawa Tengah yang juga ketua DPRD harus masuk penjara karena perkara korupsi.

Berdasarkan temuan hasil penelitian yang pernah penulis lakukan diketahui bahwa faktor penyebab kekalahan PDIP pada pemilu 2004 antara lain partai sulit membendung perilaku kader yang mabuk kekuasaan. Partai juga kurang memberi perhatian terjadinya pergeseran pemberitaan media cetak yang mengungkap sepak terjang parpol dan wakil rakyat termasuk di daerah-daerah seiring dengan kekuasaan politik yang terdesentralisasi. Di awal reformasi banyak sekali koran

lokal dan koran nasional yang menyediakan berita di kolom lokal seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang digulirkan berdasarkan UU. No. 22 Tahun 1999 sehingga berita-berita atau kasus cepat menyebar menjadi konsumsi publik. Koran Jawa Pos merupakan salah satu pelopor terbitnya halaman daerah dikenal dengan sebutan “radar”, seperti “Radar Banyumas”, “Radar Semarang”, “Radar Solo”, “Radar Kedu”, Radar Muria”. Koran lain seperti Suara Merdeka (Kolom Kedungsepur, Semarang Metro, Fokus Jateng), Kompas (Halaman Jawa Tengah), serta beberapa koran (Koran Rakyat, Meteor), dan tabloid lokal yang pada waktu itu tumbuh subur. Media tersebut menjangkau dan menyentuh isu dan masalah lokal, menyoroti kinerja birokrasi dan DPRD termasuk kasus dan tindakan tercela yang dilakukan oleh para anggota DPRD. Fungsi kontrol yang efektif tersebut berimbas pada citra birokrasi, partai politik dan para anggota DPRD dan PDI-Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu 1999 di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota mendapatkan dirinya sebagai sasaran paling empuk pemberitaan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pertemuan arus menguatnya pragmatisme dan hedonisme dengan semakin efektifitas peran kontrol media massa yang untuk kemudian mempersulit DPIIP untuk kembali memperoleh kepercayaan dari rakyat sebagai pemegang mandat dan kedaulatan. Untuk Jawa Tengah pada pemilu tahun 2004, perolehan kursi turun dari pemilu sebelumnya di tahun 1999 sebanyak 37 kursi dan kondisi ini terus berlanjut pada pemilu tahun 2009 turun lagi menjadi 23 kursi. Kondisi yang hampir sama juga terjadi di seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.

Tabel 5.

Perolehan Kursi Untuk DPRD Jawa Tengah 2004; 2009;2014

No	Nama Partai Politik	Tahun 2004		Tahun 2009		Tahun 2014	
		Kursi	%	Kursi	%	Kursi	%
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	31	31	23	23	27	27
2	Partai Kebangkitan Bangsa	15	15	9	9	13	13
3	Partai Persatuan Pembangunan	10	10	7	7	8	8
4	Partai Golongan Karya	18	18	11	11	10	10
5	Partai Keadilan Sejahtera	7	7	10	10	10	10
6	Partai Demokrat	9	9	16	16	9	9
7	Partai Amanat Nasional	10	10	10	10	8	8
8	Partai Gerakan Indonesia Raya	-	-	9	9	11	11
9	Partai Nasional Demokrat	-	-	-	-	4	4
10	Partai Hati Nurani Rakyat	-	-	4	4	-	-
11	Partai Kebangkitan Nahdatul Ulama	-	-	1	1	-	-

Jumlah	100	100	100	100	100	100
--------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber : KPUD Provinsi Jawa Tengah, diolah.

PDI Perjuangan yang berhasil memperoleh kemenangan dalam pemilu 1999 dan terpuruk dalam pemilu 2004 dengan kekalahan telak dalam pemilu legislatif nasional, turun dari peringkat 1 menjadi peringkat 3 dan kegagalan Megawati dalam Pilpres 2004 menempatkan partai berlambang banteng moncong putih melakukan introspeksi dan di pusat mengambil sikap berada di luar pemerintahan. Sikap tersebut berlangsung selama dua periode kepemimpinan yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Hal itu tidak berlaku di daerah, artinya tiap daerah menyesuaikan dengan kondisi masing-masing seperti misalnya Jawa Tengah.

Untuk Jawa Tengah dalam dua periode pemilu PDIP tetap mendominasi kursi DPRD, demikian pula dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur yang dilaksanakan tahun 2008 dan tahun 2013 juga tetap dengan percaya diri mengusung calonnya dan terbukti mampu meraih kemenangan. Kondisi ini memperlihatkan fenomena bahwa sikap politik di tingkat nasional yang selama dua periode kepemimpinan berada di luar pemerintahan tetaplah terbuka peluang untuk memperoleh kemenangan dalam perebutan jabatan politik di daerah. Tahun 2008, Bibit Waluyo yang berpasangan dengan Rustriningsih menang dalam Pemilukada dan dalam tahun 2013 Ganjar Pranowo berpasangan dengan Heru Sudjatmoko juga meraih hasil yang sama. Bibit Waluyo tidak mendapat rekomendasi untuk jabatan kedua karena pertimbangan politis terutama ketika memimpin Jawa Tengah dirasakan kurang berhasil menjaga hubungan baik dengan partai pengusung yaitu PDIP, sedangkan Rustriningsih yang menduduki jabatan Wakil Gubernur nampaknya tidak mendapatkan peran yang memadai sebagai Wakil Gubernur atau dengan kata lain pbulik menilai ada disharmoni hubungan kerja antara Gubernur dengan Wakil Gubernur yang meluas menjadi disharmoni antar pribadi. Kondisi ini diperparah dengan keretakan hubungan antara Rustriningsih dengan PDIP sebagai partai pengusung antara lain terkait dengan persaingan dalam memperebutkan jabatan ketua DPD PDI Jateng dan Rustriningsih tidak memperoleh dukungan yang meyakinkan. Kondisi yang cukup rumit ini dibumbui dengan dorongan dari segelintir politisi yang mendorong Rustriningsih untuk bersedia menjadi pengurus ormas yang baru saja dibentuk yaitu Nasional Demokrat (Nasdem) yang didirikan Surya Paloh. Riwayat kelahiran Nasdem tidak lepas dari kegagalan Rusya Paloh dalam persaingan meraih jabatan ketua Umum Golkar yang dimenangkan Aburizal Bakrie. Godaan politik ini bagai pisau bermata dua, menjanjikan sekaligus menjadi perangkap politik. Rustriningsih bersedia masuk Nasdem padahal sebagian orang sudah mengingatkan bahwa Nasdem adalah embrio organisasi yang kelak akan menjadi partai politik. Namun harus diakui bahwa resonansi berdirinya Nasdem cukup luas sehingga cukup banyak yang bersedia bergabung. Ketika tanda-tanda Nasdem akan menjelma menjadi partai politik Rustriningsih mundur teratur tapi terlambat, ia sudah mendapat stigma sebagai tidak setia pada PDI Perjuangan.

Peristiwa tersebut memperlihatkan gambaran bahwa dalam percaturan politik tidak ada kawan atau lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan. Sepanjang ada kepentingan yang sama maka lawan dalam politik bisa berkolaborasi. Rustriningsih ketika masuk Nasdem masih sebagai ormas

menimbulkan keretakan hubungan dengan PDIP. Belakangan ketika Nasdem menjadi partai politik untuk kemudian menjadi peserta pemilu 2014, memperoleh kursi dan dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden merapat ke PDIP dengan mendukung Jokowi dan Yusuf Kala bahkan untuk kemudian menjadi mitra utama dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Yusuf Kalla, status Rustriingsih tetap menjadi pihak yang tersingkir dari elit PDIP Jawa Tengah.

Tabel 6.

Distribusi Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah

No	Jabatan	2004-2009	2009-2014	2014-2019
1	Ketua	PDIP	PDIP	PDIP
2	Wakil Ketua	PG	PD	PKB
3	Wakil Ketua	PKB	PAN	Gerindra
4	Wakil Ketua	PAN	PG	PKS
5	Wakil Ketua	PD	PKS	PG

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah, Diolah.

Dari Tabel 6 diketahui bahwa ada pergeseran komposisi kekuatan politik yang menduduki jabatan pimpinan pada tiga periode. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa PDIP konsisten menempati peringkat pertama dalam pemilu era reformasi yaitu pemilu 1999. Hanya saja penulis mengalami kesulitan untuk memperoleh data distribusi pimpinan DPRD hasil pemilu 1999 sehingga yang bisa dituangkan dalam tabel ada tiga momentum yaitu hasil pemilu 2004, pemilu 2009, dan pemilu 2014.

Berbeda dengan hasil pemilu 2009 dan 2014 yang menempatkan PKS sebagai salah satu unsur pimpinan, maka di tahun 2004 PKS belum berhasil menempatkan anggotanya menjadi unsur pimpinan DPRD karena hanya memperoleh 7 kursi, sedangkan di tahun 2009 dan 2014 memperoleh 10 kursi sehingga bisa menempatkan kadernya menjadi unsur pimpinan. Sebaliknya Partai Demokrat (PD) yang di tahun 2004 dan 2009 bisa menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan DPRD namun tahun 2014 tidak berdaya menghadapi citra partai yang turun akibat kasus korupsi yang dilakukan beberapa pengurus pusat dan tampilnya pesaing baru yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meraup 11 kursi sehingga berhak menempatkan kadernya menjadi unsur pimpinan DPRD. PAN yang dalam pemilu 2004 dan 2009 mampu meraih kursi jabatan unsur pimpinan, di tahun 2014 tidak mampu mempertahankan posisinya, sebaliknya PKB yang di tahun 2009 kehilangan kesempatan menduduki kadernya dalam unsur pimpinan, di tahun 2014 mampu memulihkan dan merebut kembali posisi yang hilang dan kembali menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Partai Golkar yang sejak reformasi menderita kekalahan namun sebagai partai lama dan punya pengalaman panjang sebagai partai pemenang di era Orde Baru walaupun dalam tiga kali pemilu terus mengalami penurunan perolehan kursi yaitu tahun 2004 18 kursi, tahun 2009 11 kursi dan tahun 2014 10 kursi, memperlihatkan dirinya masih mampu menunjukkan sisa kekuatannya sehingga dalam tiga periode pemilu juga bisa menempatkan kadernya sebagai unsur pimpinan.

Tabel 7.
Distribusi Jabatan Komisi Menurut Fraksi di DPRD Provinsi
Jawa Tengah

Komisi	2009-2014			2014-2019		
	Ketua	WK	Sekretaris	Ketua	Wk Ketua	Sekretaris
A	FPKB	FPG	FPD	FPPP	FPKB	FPDIP
B	F Gerindra	FPPP	FPKB	FPKB	FPG	FPDIP
C	FPDIP	FPKB	FPG	FPDIP	FGerindra	FPD
D	FPDIP	FPAN	FPG	FPDIP	FPKS	FPAN
E	FPD	FPKS	FPDIP	FPD	FPDIP	FPKB

Sumber : Sekwan DPRD Provinsi Jateng Diolah.

Dari Tabel 7. diketahui bahwa di DPRD Provinsi Jawa Tengah ada alat kelengkapan yang dinamakan komisi yang masing-masing komisi ada jabatan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan anggota komisi yang jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tiap Komisi mengemban tugas bidang yang berbeda yaitu Komisi A Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan, Komisi D Bidang Pembangunan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan rakyat dan masing-masing komisi mempunyai partner kerja dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No.2 Tahun 2014. Jabatan ini sangat strategis karena berkenaan dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sehingga distribusi jabatan yang ada dalam komisi juga mencerminkan komposisi kekuatan politik atau perolehan kursi dari partai-partai politik yang bertarung dalam pemilu. Sebagaimana yang terjadi dalam jabatan-jabatan alat kelengkapan yang lain, maka komisi-komisi dalam DPRD Provinsi Jawa Tengah juga menempatkan PDI-Perjuangan sebagai partai yang paling banyak menempatkan anggotanya dalam jabatan komisi. Untuk tahun 2009 Ketua Komisi C dan Ketua Komisi D dipegang PDI-Perjuangan sedangkan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Demokrat masing-masing menduduki jabatan Ketua Komisi A, Komisi B, dan Komisi E. Tahun 2014 PDI-Perjuangan tetap memimpin Komisi C dan D, sedangkan partai lainnya mengalami pergeseran, Ketua Komisi A dijabat PPP, Komisi B PKB, Komisi E Partai Demokrat yang berarti Partai Gerindra tidak memperoleh jabatan Ketua Komisi. Rupanya hal ini terkait dengan hasil pemilu nasional yang berlanjut dengan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana PDI-Perjuangan bersaing ketat terutama dalam Pilpres yang kemudian mengkristal dalam koalisi di DPR antara Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih. Kalau di DPR hasilnya nampak jelas bahwa PDI-Perjuangan yang memenangi pemilu legislatif dan Pilpres tapi gagal dalam menempatkan kadernya sebagai salah satu unsur pimpinan DPR dan ketua komisi sedangkan di DPRD Provinsi Jawa Tengah Gerindra masih meraih jabatan unsur pimpinan namun dalam komisi tidak berdaya menghadapi tekanan koalisi Indonesia Hebat yang pada gilirannya tidak

mampu menempatkan kadernya dalam jabatan ketua komisi dan hanya memperoleh jabatan wakil ketua Komisi

4. Penutup

4.1. Simpulan

Pertama, bahwa pemilu yang dilaksanakan di Jawa Tengah sejak era reformasi yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu tahun 1999 untuk kemudian diselenggarakan lagi pada tahun 2004, 2009 dan tahun 2014 telah merubah peta kekuatan politik secara nasional termasuk di Jawa Tengah. Sebelumnya selama Orde Bru berkuasa Golkar mendominasi pemilu 1971, 1977, 1982,1987,1992,1987 memberi gambaran betapa kekuatan Golkar sulit ditumbangkan, namun krisis moneter dan krisis politik tahun 1998 merubah yang sebelumnya seolah mustahil berubah menjadi kenyataan. Perpolitikan Indonesia menjadi semakin terbuka terhadap semua kemungkinan pada kekuatan politik yang bertarung dalam pemilu untuk memperoleh kemenangan dan dalam hal ini nampaknya Golkar semakin sulit untuk mengambil kembali posisi dominan yang mereka nikmati bersama dengan Rejim Soeharto.

Kedua, Di Jawa Tengah PDI-Perjuangan mengambilalih dominasi kekuatan politik ditandai dengan kemenangan dalam pemilu untuk DPRD Provinsi di tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Walaupun jumlah kursi yang diperoleh fluktuatif namun posisinya sebagai pemenang selama empat kali periode tak tergoyahkan. Konstelasi itu menjadikan distribusi jabatan-jabatan di DPRD juga mengalami perubahan dari satu periode ke periode lainnya. Hanya saja peneliti menghadapi kesulitan untuk memperoleh data yang lengkap tentang pergeseran kekuatan politik yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah secara lengkap sejak pemilu era reformasi sehingga hanya mampu menyajikan sebagian untuk tiga periode pemilu yaitu perolehan kursi tahun 2004, 2009, dan 2014, sedangkan untuk jabatan-jabatan dalam komisi hanya dua periode yaitu pemilu 2009 ndan 2014.

4.2. Rekomendasi

Pertama, Kelengkapan arsip dan dokumentasi Sekretariat DPRD perlu terus dibenahi karena akan membantu penelitian dalam memperoleh data yang diperlukan terutama untuk penelitian otonomi daerah dan politik lokal.

Kedua, Perubahan kekuatan politik di DPRD Provinsi Jawa Tengah sejak era reformasi yang merupakan penanda positif terhadap perkembangan dan penguatan demokrasi perlu terus dipertahankan sehingga kemenangan dan kekalahan politik melalui pemilu tidak hanya dianggap wajar karena politik bersifat dinamis - tidak sebagaimana di era Orde Baru - namun lebih dari itu, proses demokratisasi semakin memperlihatkan gambaran yang obyektif dan rasional.

Daftar Daftar

Aspinall Edward and Mietzner Marcus (ed), *Problem of Democratisation in Indonesia*, Institute of Soetheast Asian Studies Singapore, 2010.

Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (edisi revisi), Ikrar Mandiri, Jakarta, 2008.

Creswell W.John, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2014

- Croutty William, Katz S. Richard, *Handbook Partai Politik*, Nusamedia, Bandung, 2014
- Crouch Harold, *Militer dan Politik Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1986.
- Horowitz L. Donald, *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Linz J. Juan and Stepan Alfred, *Problem of Democratic Transition and Consolidation : Shouthern Europe, South America, and Post-Communist Europe*, John Hopkins University Press Baltimore and London. Denzin K.
- Norman and Lincoln S. Yvonna, *Qualitative Research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Ritzer George, *Teori Sosiologi, Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1992
-, *Dokumen Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, mandiri, dan Berkepribadian*, Jakarta 2014
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fokus Media, Bandung, 2009.
- Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Fokus Media, Bandung, 2004.
- Kompas, 24-12-2014.

BIODATA PENULIS

Welhelmina Selfina Beli

Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (Welhelminaselfina@gmail.com)

Zafar Siddik Pohan

Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Yuwanto

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (yuwantosaja@yahoo.com)

Kushandajani

Dosen magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang. (kushandayani@undip.ac.id)

Ahmad Taufiq

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (ahmadtaufiqimron@gmail.com)

Priyatno Harsasto

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (harunosa@yahoo.com)

Samsul Ode

Alumni Program Studi Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang.

Fitriyah

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (fitriyasemarang@yahoo.com)

Turtiantoro

Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang (turtiantoro@yahoo.com)